

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi yang mana demokrasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang mana *democratia* yang artinya adalah kekuasaan rakyat.¹ Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²

Dalam sistem Negara demokrasi terdapat adanya sistem pemilihan secara langsung yang mana di dalamnya terdapat sistem pemilu. Adapun pengertian pemilu menurut Ibnu Tricahyono menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.³ Sedangkan menurut Pratikno yang menyatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara

¹Sukron Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 85

² Erwin Purnama. *Apaitu Demokrasi*.
<https://www.kompasiana.com/erwinpurnama/56e65367c523bd6f0cfb3169/apaitu-demokrasi> (diakses pada 28 Oktober 2020, pukul 21.09).

³Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. *Partisipasi Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (teori, konsep dan isu strategis)*. Raja Grafindo Persada. 2015. Hlm. 50

rakyat (*votes*) menjadi wakil rakyat (*seats*).⁴

Dalam sistem pemilu ada namanya partisipasi warga Negara dalam melakukan pemilihan umum yang mana warga Negara berperan aktif dalam melakukan pemilihan tersebut. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga Negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.⁵

Sedangkan pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, atau baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.⁶

Menurut Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain seperti memilih pemimpin Negara dan secara langsung, atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁷

Menurut Budiardjo partisipasi politik pemilih pemula adalah sebagai keikutsertaan pemilih pemula atau kalangan muda,

⁴*Ibid.*

⁵Mariani dan Samiruddin T. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Periode 2013-2019". SELAMI IPS Edisi Nomor 46.Vol 3. Tahun XXII. Desember 2017.hlm. 136.

⁶ Marissa Marlein Fenyapwain. "Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakas". Journal "Acta Diurna" Vol I No. 1 Tahun 2013.

⁷Ike Atika Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi. "Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor". Jurnal Ilmu-ilmu sosial dan Humaniora Vol 20. No 2. Juli 2018. hlm 156

seorang/kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih seorang pemimpin baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mana akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁸

Ada beberapa alasan mengapa para pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada. *Pertama*, sebagian besar pemilih pemula masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk mengubah bangsa ini kearah lebih baik. *Kedua*, mereka berpartisipasi karena diajak orang lain. *Ketiga*, karena diiming-imingi honor yang besar, sedangkan *Keempat* hanya sekedar ikut-ikutan.⁹ Sedangkan alasan yang mendasari pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada atau golput adalah : ketidakpercayaan kepada partai politik dan kandidat yang ada, kesalahan pada administrasi data pemilih, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU.¹⁰

Mhd. Anwar Sadat, SE, Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Jambi menyampaikan, bahwa, pemilih pemula di Kota Jambi mencapai sebanyak 3.441.¹¹ Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 akan menjadi sejarah dimana pemilu yang pertama kali diselenggarakan ditengah situasi pandemi covid 19. Pilkada yang

⁸Irma Yanita Lubis, Skripsi :”*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi Sma Swasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandanga Fiqh Siyasah*”(Medan : UIN. 2018). hlm. 14

⁹Siska Sasmita, “*Peran Informasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu/Pemilukada*”.Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2011. Hlm. 221

¹⁰*Ibid.*

¹¹wawancara dengan Mhd. Anwar Sadat, Tanggal 25 Agustus 2021 di KPU Kota Jambi

diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan momen yang sangat penting karena dalam pelaksanaan akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dengan berbagai situasi. Regulasi pelaksanaan pemilu pada masa pandemi Covid 19 tidak ada yang berubah. Namun, terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada telah dikeluarkan untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak, beberapa perubahan yang ada dalam perppu tersebut yakni perubahan Pasal 120 serta penambahan Pasal 122A dan 201A.¹²Regulasi tidak ada yang berubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih dipakai, peraturan KPU juga masih dipakai, yang dilakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru sesuai dengan situasi pandemi dan mengutamakan protokol kesehatan, seperti Peraturan pelaksanaan kampanye yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, antara lain tidak diperbolehkan melakukan kampanye yang berpotensi membuat kerumunan, mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring sehingga tidak terjadi kontak fisik dan kerumunan, jika melakukan pertemuan tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas ruangan, jaga

¹²Kompas.com. “DPR Sahkan Perppu Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 Jadi Undang-Undang” (<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/16334981/dpr-sahkan-perppu-pilkada-nomor-2-tahun-2020-jadi-undang-undang?page=all>), Diakses pada 22 Juni 2021. 21:09

jarak serta menggunakan masker dan face shield.¹³

Dalam pesta demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi hal yang mendasar sebagai tolok ukur sukses tidaknya pemilu. Partisipasi pemilih ini tentu punya potensi menurun mengingat masyarakat masih khawatir dengan Covid 19 ini. Trauma masyarakat saat ini terhadap corona ini sangat signifikan, jadi tidak ada yang fokus melihat kegiatan Pilkada saat ini.¹⁴

Firman Noor yang merupakan kepala Pusat Penelitian Politik LIPI mengatakan bahwa digelar nya pilkada 2020 serentak ini bisa jadi menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kali ini. Pada keadaan pandemi ini masih banyak masyarakat yang merasa kurang aman jika harus keluar rumah dan terlibat dalam kerumunan yang terjadi pada saat pilkada diselenggarakan. Tidak hanya itu saja, Firman juga mengatakan bahwa pada saat normal tanpa adanya pandemi saja keterlibatan masyarakat sebagai pemilih masih sangat rendah apalagi saat pandemi. Partisipasi masyarakat baik pada pemilu maupun pilkada masih belum mencapai tingkat yang memuaskan. "Kalau tidak pandemi, jorjoran kampanye itu dilakukan, kampanye demikian menarik, tingkat keterlibatannya yang aman saja rata-rata 70 persen. Apalagi sekarang

¹³Gungde Ariwangsa. *KPU Siapkan Aturan Baru Untuk Pilkada 2020*. <https://m.suarakarya.id/detail/114386/KPU-Siapkan-Aturan-Baru-Untuk-Pilkada-2020> (diakses pada 18 Desember 2020, pukul 20.19).

¹⁴Jambiupdate. "Akibat Corona. Partisipasi Pemilih Pilkada 9 Desember di Jambi Berpotensi Menurun." (<https://www.jambiupdate.co/read/2020/04/26/83087/akibat-corona-partisipasi-pemilih-pilkada-9-desember-di-jambi-berpotensi-menurun>. Diakses pada 13 Oktober 2020, 21:15)

dengan situasi yang serba tidak meriah".Firman juga mengungkapkan bahwa perhatian masyarakat saat ini masih terpecah belah khususnya ekonomi dan belum lagi keamanan dan juga kesehatan sehingga sangat mungkin terjadi penurunan pemilih.¹⁵

KPU telah menetapkan beberapa misi didalam renstra KPU 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Didalam misi dari KPU salah satunya meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak, maka dapat disimpulkan

¹⁵Lingkar madiun. "Pilkada Di Masa Pandemi. Partisipasi Masyarakat Diprediksi Menurun." (<https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-66872364/pilkada-di-masa-pandemi-partisipasi-masyarakat-diprediksi-menurun>. diakses pada 15 November 2020. 17.39).

bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan kualitas pemilih. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.

Mengacu pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irma Yanita Lubis berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandangan Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula dan mengetahui pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Partisipasi Politik Pemilih pemula Siswa-Siswi SMA Prayatana Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama* Partisipasi politik pemilih pemula siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 sangatlah rendah dikarenakan ketidak tahuan akan informasi mengenai tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan tingkat kepedulian mereka sangatlah minim, karena mereka tidak mau mencari informasi mengenai tahapan dan pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, *Kedua* Pendapat Komisi Umum (KPU) Kota Medan bahwa KPU Kota Medan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 sesuai dengan “Laporan Sosialisasi Goes To School Pemilih Pemula

KPU Kota Medan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018”.¹⁶

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Primandha Sukma Nur Wardhani berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2018. Hasil dari penelitian ini adalah Pendidikan politik yang masih rendah membuat Pemilih Pemula ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu pemberian suara, kampanye dan berbicara masalah politik. Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu *Pertama*, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik, pemilih pemula terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum karena ada rangsangan dari media masa atau elektronik. *Kedua*, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat.¹⁷

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Diah Setiawaty berjudul Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik yang Programatik. Hasil dari penelitian ini adalah selama ini kerja-kerja sosialisasi yang dilakukan lebih bersifat kepada informasi

¹⁶ Irma Yanita Lubis. Skripsi : “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi Sma Swasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 *Pandangan Fiqh Siyasah*.” (Medan : UIN. 2018). hlm. 80-81

¹⁷ Primandha Sukma Nur Wardhani. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1) (2018). Hlm. 62

pemilih alih-alih pendidikan pemilih. KPU masih lebih focus kepada hal-hal yang sifatnya sosialisasi dan mobilisasi sosial melalui pemanfaatan media massa untuk menjangkau pemilih secara massif, sosialisasi dengan basis komunitas seperti tukang ojek, serta kerjasama dengan NGO. Akan tetapi sayangnya KPU belum membuat formulasi dari konsep dan kurikulum terpadu dari pendidikan politik itu sendiri. Selain itu KPU harus mulai focus untuk menjaring pemilih muda dan pemilih pemula, tidak hanya melalui pendidikan tetapi juga melalui teknologi informasi, internet dan sosial media. Hal ini karena jumlah pengguna internet dan pengguna smartphone di Indonesia yang terus meningkat.¹⁸

Kesimpulan dari tiga hasil penelitian terdahulu yaitu ; *pertama*, penelitian pertama menemukan bahwa partisipasi politik pemilih pemula siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 sangatlah rendah dikarenakan ketidak tahuan akan informasi mengenai tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan tingkat kepedulian mereka sangatlah minim, karena mereka tidak mau mencari informasi mengenai tahapan dan pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *Kedua*, hasil penelitian kedua yaitu pendidikan politik yang masih rendah membuat Pemilih Pemula ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu pemberian suara, kampanye dan berbicara

¹⁸Diah Setiawaty. “Mendorong Partisipasi Pemilih Muda melalui Pendidikan Politik yang Programatik”. Jurnal Islamic Review. Vol. III No. 1. April 2014. hlm 140--141

masalah politik. *Ketiga*, Hasil dari penelitian ini adalah selama ini kerja-kerja sosialisasi yang dilakukan lebih bersifat kepada informasi pemilih alih-alih pendidikan pemilih. KPU masih lebih focus kepada hal-hal yang sifatnya sosialisasi dan mobilisasi sosial melalui pemanfaatan media masa untuk menjangkau pemilih secara massif, sosialisasi dengan basis komunitas seperti tukang ojek, serta kerjasama dengan NGO.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, bencana non alam yang pertama kali dialami di Indonesia pada masa pelaksanaan Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana strategi KPU Kota Jambi menghadapi Pilgub ditengah pandemic covid-19 untuk pertama kali nya dalam meningkatkan partisipasi politik terutama partisipasi Pemilih Pemula. Dimana yang menjadi keterkaitan penulis dalam penelitian ini adalah sejauh mana strategi yang dilakukan KPU Kota Jambi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Jambi.

Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum, ruang ruang dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberi rasa kenyamanan dalam diri mereka, adapun ruang-ruang tempat belajar

politik diantaranya : pertama ruang keluarga, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk beluk politik yang mereka inginkan. Kedua, pengaruh teman sebaya, faktor ini sangat dipertimbangkan karena ini dominan dapat mengubah pola berpikir dalam berdemokrasi, yang ketiga pendekatan.

Dari penjelasan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik mengangkat judul “STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020 KOTA JAMBI DITENGAH PANDEMI COVID-19”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula ditengah Pandemi Covid-19?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula ditengah Pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan akademis dan ilmiah dalam melihat bentuk partisipasi politik khususnya pemilihan pemula.
2. Secara kelembagaan, penelitian ini diharapkan sebagai literature baru bagi daftar kepustakaan konsentrasi dengan bidang dan permasalahan tentang partisipasi politik pemilihan pemula untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Universitas Jambi bagi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dampak strategis terhadap pemilihan pemula.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani, sebagai kata benda "*strategos*", merupakan gabungan kata "*stratos*" (militer) dan "*ag*" (memimpin). Sebagai kata kerja, *stratego*, berarti merencanakan (*to plan*). Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.¹⁹

Menurut Rosady Ruslan mengemukakan bahwa “strategi itu pada hakekatnya adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya.²⁰ Selanjutnya menurut ahli sosiologi Philip Selznick dalam Husein Umar, mengatakan bahwa strategi yang baik adalah strategi yang memuat nilai-nilai para anggotanya sehingga mereka merasa terikat dengan tujuan perusahaan dan dapat menjadi dorongan semangat secara terus-menerus bagi anggotanya.²¹ Menurut Siagian strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan ke semua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.²²

Dari uraian pengertian strategi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) dalam organisasi yang memuat nilai-nilai para anggotanya untuk pencapaian tujuan organisasi.

¹⁹Siti Purwati. “Strategi Pembelajaran”.
<https://a-ratman.blogspot.com/2011/09/strategi-pembelajaran.html>. (diakses pada 28 September 2011, pukul 16.04)

²⁰Dwi Haryono. “Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015”. *Jurnal Administrative Reform*. Vol 6. No 2. Juni 2018. hlm. 68.

²¹*Ibid.*

²²Aris Kurniawan, Pengertian Strategi – Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/>. (diakses pada 03 Desember 2020, pukul 20.39)

Menurut Nawawi Manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategis) yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh (disebut visi), dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi ini (keputusan yang fundamental dan pokok), sehingga memungkinkan organisasi untuk berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam upaya untuk menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta layanan) kualitas, optimasi diarahkan pada pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan sasaran (tujuan operasional) organisasi.²³

Proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap, tahap-tahapnya sebagai berikut :

- a) *Perumusan strategi*, Pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

²³Aris Kurniawan. *Pengertian Manajemen Strategi – Definisi, Posisi, Pembentukan, Komponen, Tujuan, Tugas, Manfaat, Para Ahli*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-manajemen-strategi/>. (diakses pada 15 Januari 2021, pukul 15.54)

- b) *Pelaksanaan strategi*, Tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha– usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.
- c) *Evaluasi strategi*, Tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategis tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah :
- 1) Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini,
 - 2) Mengukur kinerja, dan
 - 3) Melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok.²⁴

²⁴Hestanto. “*Tahap-tahap Dalam Manajemen Strategis*”.
<https://www.hestanto.web.id/tahap-tahap-dalam-manajemen-strategis/#:~:text=Manajemen%20strategi%20merupakan%20sebuah%20proses,implementasi%20strategi%20dan%20evaluasi%20strategi.&text=Semua%20strategi%20dapat%20dimodifikasi%20di,eksternal%20dan%20internal%20selalu%20berubah.> (diakses pada 22November 2020, pukul 15.40)

Dari uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) dalam organisasi yang memuat nilai-nilai para anggotanya untuk pencapaian tujuan organisasi. Pada masa pandemi saat ini perencanaan yang telah direncanakan sejak dahulu bisa berubah karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan perencanaan/tindakan yang telah dirancang, yang memungkinkan perubahan perencanaan sehingga tujuan dalam suatu organisasi tersebut dapat dilaksanakan.

1.5.2. **Partisipasi Politik**

Menurut Budiardjo, M., sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).²⁵ Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan sebuah kegiatan dalam kegiatan politik warga masyarakat, baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung, dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

²⁵Eneng Martini.Idham Azwar dan Febri Setia Pringga.”Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi Jawa Barat”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 2, No 1, Juni 2018.hlm. 274.

Dalam definisi tersebut, partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbying* para profesional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Secara tersirat dalam hal ini partisipasi politik bukan hanya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para elite atau profesional di bidang politik melainkan keterlibatan masyarakat awam dalam kegiatan politik yang berimplikasi pada demokrasi. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Menurut Edwin James Brady partisipasi politik mencakup empat konsep dasar yaitu, aktivitas atau aksi, warga negara biasa, politik dan pengaruh. Aksi atau aktivitas dalam hal ini merupakan sesuatu yang dilakukan oleh warga negara biasa.²⁶ Partisipasi politik adalah tindakan atau aktivitas, tidak berbentuk keinginan, pendapat atau keyakinan sekalipun. Aksi atau aktivitasnya pun

²⁶Joakim Ekman, *Political Participation and Civic Engagement: Towards A New Typology*. Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences, (2012): 12.

dilakukan dengan cara sukarela dengan kata lain tidak ada paksaan untuk melakukan tindakan atau aktivitas berpartisipasi.²⁷

Dalam praktiknya ada dua bentuk partisipasi, pertama adalah bentuk partisipasi konvensional, yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua adalah partisipasi non-konvensional dimana warga negara mempengaruhi proses yang dapat merubah hasil. Contoh dari partisipasi non-konvensional ini adalah demonstrasi.²⁸

Di Negara demokratis, konsepsi dasar partisipasi politik adalah kedaulatan bangsa berada di bawah kekuasaan warga negara, Implementasinya melalui kegiatan umum untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta untuk mementukan pemimpin berikutnya. Dalam prosesnya, partisipasi politik memiliki beberapa praktek yang biasa dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk dari partisipasi politik, diantaranya:²⁹

1. Pemberian suara dalam pemilu(voting)

Pemberian suara dalam pemilu atau *voting* merupakan salah bentuk partisipasi politik dari warga negara yang sering dilakukan ketika pemilu diselenggarakan atau merupakan

²⁷*Ibid.*

²⁸Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. Kuasa Rakyat: “Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru, 88

²⁹Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. Kuasa Rakyat: “Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru, 260-261`

aktivitas partisipasi yang umum dilakukan. *Voting* memberi tekanan yang tinggi terhadap pemerintah karena aktivitas ini menentukan kandidat atau partai politik mana yang akan mengontrol atau menentukan sebuah kebijakan.

2. Kampanye

Menurut Saiful Mujani dalam bukunya yang berjudul *Muslim Demokrat*, kampanye merupakan bentuk partisipasi politik yang mencerminkan ketertarikan warga negara pada politik secara lebih akurat dari pada voting.³⁰ Seseorang yang aktif berpartisipasi dalam proses kampanye dinilai memiliki kemauan untuk menyampaikan informasi yang akan mempengaruhi orang lain terhadap suatu pandangan politik yang kemudian dapat berpengaruh pada partisipasi politik orang lain.

3. Aktivitas kemasyarakatan

Aktivitas kemasyarakatan merupakan bentuk partisipasi politik melalui kerjasama dengan orang lain mengenai masalah sosial dan politik. Dalam bentuk partisipasi politik ini dinilai dari bagaimana partisipasi atau keikutsertaan orang lain dalam mengorganisasikan anggota masyarakat untuk

³⁰Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. *Kuasa Rakyat: "Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru"*, 262

berperan serta aktif dalam sebuah lembaga organisasi masyarakat.

Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan manifestasi dari pelaksanaan kewenangan hukum oleh rakyat. Ketika kita membahas partisipasi politik dan demokrasi, kedua hal tersebut khususnya partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses demokratisasi, khususnya di negara-negara berkembang. Demokrasi merupakan sumber otoritas bagi pemerintah dan prosedur untuk pemerintah. Proses demokratisasi adalah dengan cara Pemilihan Umum bebas, terbuka, dan adil.³¹

Disisi lain, partisipasi politik mengasumsikan warga negara dengan budaya politik. dalam hal ini budaya politik dianggap sebagai sikap dan orientasi warga negara terhadap sistem politik negara dan berbagai bagiannya, dan sikap terhadap peran seseorang dalam sebuah sistem, tentang bagaimana warga negara merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.³²

³¹Khairunnisa, Skripsi :”Partisipasi dan Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi Pada Siswa Lembaga Pendidikan non-formal BTA 45 tebet, Jakarta Selatan)”(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 20

³²Ibid.

1.5.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi pemilih pemula tercermin dalam perilaku dan aktifitas dalam kegiatan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi partisipasi seperti yang dikemukakan oleh Hermawan berpendapat berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah :

- a. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
- b. Lingkungan politik yang langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian actor seperti keluarga, teman, agama, kelas dan sebagiannya.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman dan lain-lain.³³

³³Suhadi, Skripsi : *"Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015"* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, 2016), hlm. 9

1.5.4. Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Menurut Budiardjo M. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.³⁴ Sedangkan menurut Sunarso Politik secara ringkas adalah sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya.³⁵

Sosialisasi politik merupakan sebuah usaha/kegiatan memberikan pengenalan kepada individu agar individu tersebut mengerti sistem politik dan dapat membuat reaksi politik atas gejala politik yang terjadi.³⁶

M. Rush dan P. Althoff membatasi sosialisasi politik sebagai “suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala politik”.³⁷ Adapun jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya menurut syahril syarbaini dkk, terbagi menjadi dua, yaitu :

³⁴Eneng Martini, Idham Azwar dan Febri Setia Pringga, ”Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi Jawa Barat”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 2, No 1, Juni 2018, hlm. 273.

³⁵Eneng Martini, Idham Azwar dan Febri Setia Pringga, ”Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi Jawa Barat”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 2, No 1, Juni 2018, hlm. 273

³⁶M. Ilham Wahyudi Prasetyo dan M. Fachri Adnan, ”Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018”. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 2, No. 3 Tahun 2019, hlm. 159

³⁷*Ibid.*

- a. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- b. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi.³⁸

Merujuk pada pengertian sosialisasi, proses ini terjadi melalui media perantara. Berikut ini adalah beberapa media sosialisasi:

a) Keluarga

Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertamakali diterima oleh setiap individu. Anggota keluarga diantaranya, ayah, ibu, saudara, dan lain-lain, saling berinteraksi. Di sinilah pertamakali individu mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan.

b) Teman

Setelah keluarga, proses sosialisasi terjadi melalui teman. Ketika anak-anak berinteraksi dengan teman sebayanya, terjadi proses sosialisasi dan mempelajari nilai dan norma yang baru.

³⁸Putri pratiwi, "School's Role On Students Political Socialization In SMA Negeri 1 Purwodadi". Jurnal Ilmu Pemerintahan , hlm. 5

c) Sekolah

Lembaga pendidikan merupakan tempat proses sosialisasi yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi semua orang. Pada umumnya, semua orang belajar dan melatih keterampilan dan kemandiriannya. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya juga sering terjadi di sekolah.

d) Media Massa

Proses sosialisasi juga dapat terjadi melalui media massa atau pers, baik itu media cetak maupun media elektronik. Melalui media massa, setiap individu dapat mempelajari berbagai informasi baru yang belum diketahui, baik itu hal positif maupun negatif.³⁹

Alfian menjelaskan Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan ini akan melahirkan sikap dan tingkat laku politik baru yang mendukung system politik yang ideal itu bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan baru.⁴⁰

³⁹ M. Prawiro. "Pengertian Sosialisasi : Arti, Tujuan, Fungsi, Media dan Contoh Sosialisasi".

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html> (diakses pada 3 November 2021, pukul 20.35)

⁴⁰ Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Social Politik 5No. 1 Tahun 2017, hlm. 56

Menurut Kartaprawira, terdapat beberapa bentuk penyelenggaraan pendidikan politik yang dapat dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal (sekolah) ataupun informal.⁴¹

Tujuan dari pendidikan politik yang dikemukakan oleh sunarso Tujuan pendidikan politik yang terpenting adalah kesadaran warga Negara tentang hak kewajiban sesuai dengan konsitusi.⁴²

1.5.5. **Pemilih Pemula**

Pemilih pemula menurut Suhartono adalah khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas dan cenderung pada hal-hak yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan

⁴¹ Muchlisin Riadi, "Pendidikan Politik (Pengertian, Fungsi, Bentuk dan Hambatan)", <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/pendidikan-politik.html>. (diakses pada 03 Desember 2020, pukul 21.04)

⁴² Eneng Martini, Idham Azwar dan Febri Setia Pringga, "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi Jawa Barat". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 2, No 1, Juni 2018, hlm. 274.

akandihindari.⁴³ Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadi seseorang dapat memilih adalah⁴⁴:

1. Umur sudah 17 tahun
2. Sudah/pernah kawin; dan
3. Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian.

Para pemilih pemula berperan aktif dalam kegiatan pemilu dimana pemilu itu sendiri merupakan mekanisme penyeleksian dan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai dalam menjalani kehidupan dan bernegara. Pemilih pemula usia Sekolah Menengah atas (SMA) memang menjadi segmen yang unik. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat. Sebenarnya pemilih pemula bisa ditempatkan sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal.

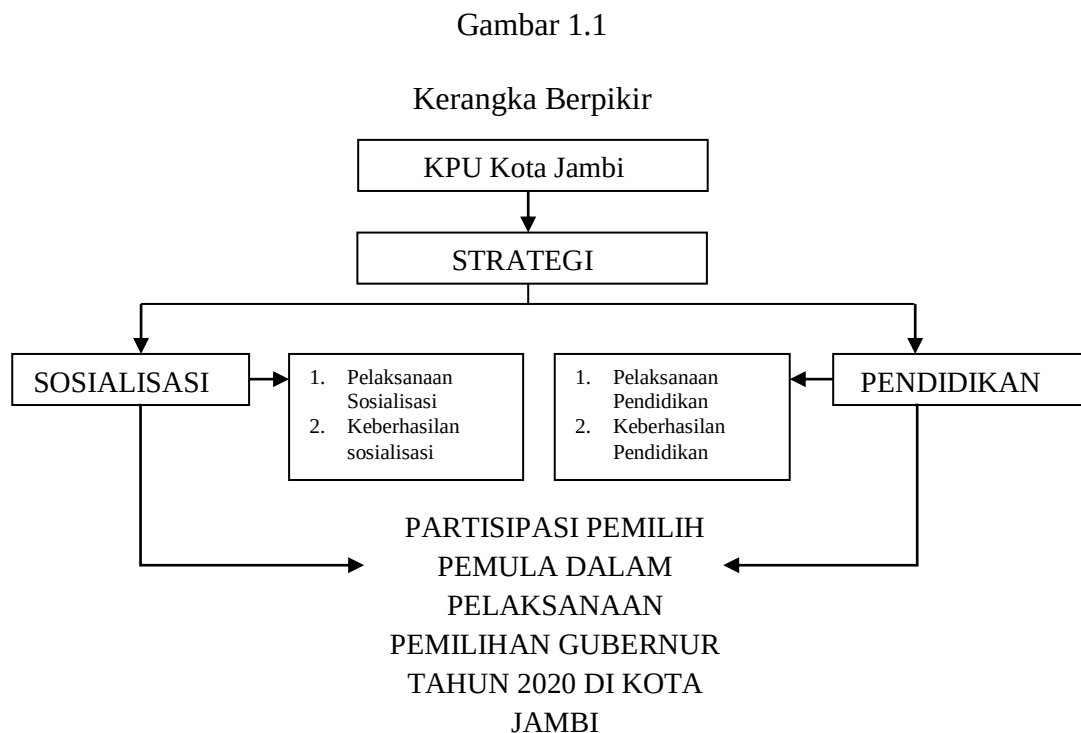
⁴³Lina Marsellina Sijabat “*Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019*” Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 20

⁴⁴Indra Richard Rompas “*Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Bongkudai Selatan Kecamatan Kooat Kabupaten Bolaang Mongodow Timur*” Program studi Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, hlm. 10

Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat.

1.6. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada kerangka teori yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan teori dari para ahli seperti kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian kerangka berpikir dalam penelitian dapat digambarkan dibawah ini :



1.7. Metode Penelitian

Dalam konteks ini, metode penelitian adalah serangkaian prosedur berupa cara yang digunakan penelitian untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dan teknik operasional dalam mengumpulkan data, instrument penelitian dan analisis data.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Kota Jambi.

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan & Taylo, dia mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁵

Memilih penelitian pendekatan kualitatif karena dianggap mampu memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi dilihat dari sisi makna yang diletakkan subjek untuk membuat gambaran fenomena yang diselidiki secara sistematis, factual dan akurat. Kemudian metode penelitian dalam penelitian ini adalah

⁴⁵Lexy J. Moleong. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. edisi revisi (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.4

dengan menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, actual dan akurat sesuai dengan fakta yang ada.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Kota Jambi.

c. Fokus Penelitian

Yang dimaksud fokus penelitian adalah peneliti tidak terjebak oleh luas bidang, banyak perlakuan dangkal hasilnya. Spradley menyatakan fokus itu merupakan paku domain tunggal atau yang berhubungan dalam situasi sosial. Agar dapat memahami secara luas dan mendalam pada sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian mengenai Strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Kota Jambi.

d. Teknik penentuan informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁶

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilihan dan pelaksanaan pemilihan Gubernur. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dijadikan subyek penelitian diantaranya yaitu *Ketua KPU Kota Jambi, Pemilih pemula (Mahasiswa, SMA dan anak putus sekolah)*. Sedangkan teknik *Snowball Sampling* digunakan untuk mengembangkan informasi dari informan yang telah ditentukan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan Kuisisioner terbuka.

⁴⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 219

5.1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah Ketua KPU dan Pemilih Pemula (Mahasiswa, SMA dan anak putus sekolah).

Secara sistematis atas dasar tujuan penelitian. Interview ada 3 macam yaitu :

1. Interview tak terpimpin

Interview tak terpimpin adalah proses wawancara dimana interview tidak sengaja mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dengan orang yang diwawancarai.

2. Interview terpimpin

Interview terpimpin merupakan wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

3. Interview bebas terpimpin

Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara interview tak terpimpin dan interview terpimpin.

Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok

⁴⁷Marzuki. "*Metodologi Riset*". (Yogyakarta : BPPE UII Yogyakarta, 2001).
hlm.62

masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus dapat mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.⁴⁸

Dari berbagai jenis interview diatas, penulis menggunakan interview bebas terpimpin, artinya bahwa penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Penulis menggunakan cara ini karena untuk mendapatkan data yang relevan dan juga tidak menginginkan adanya kekakuan antara penulis sebagai penginterview dengan orang yang diinterview.

5.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian, atau data dari individu sebagai objek penelitian.

5.3. Kuisisioner Terbuka

Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan

⁴⁸Suharsimi Arikunto. *“Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek”*. (Jakarta : Bina Aksara, 1989). hlm. 97

pendapat mengenal pertanyaan yang diberikan peneliti sehingga dalam hal ini proses mendapatkan datanya bisa dibidang memerlukan keahlian penelitian dalam memberikan pertanyaan yang mudah untuk di pahami.⁴⁹

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*.⁵⁰

⁴⁹ Dosen sosiologi. Com. “*Pengertian Kuesioner, Jenis, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya*”, <https://dosensosiologi.com/pengertian-kuesioner-jenis-dan-contohnya-lengkap/>. (diakses pada tanggal 01 Desember 2021 pukul 18.49 WIB)

⁵⁰Sugiyono.Op. Cit. hlm. 337

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵¹

3. Penarikan kesimpulan/verification

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal

⁵¹*Ibid*, hlm. 338

yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan , didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.